

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019
JL. Raya Kaliasin Tromol Pos I Karawang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Karawang , 31 Desember 2019
Kepala Balai,



Dr. Ir. Enie Tauruslian Amarullah, M.P
NIP. 196905031990032004

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Tanah
 - B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - B.5.5. Belanja Modal Lainnya
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Lain-lain
 - C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karawang , 31 Desember 2019

Kepala Balai,



Dr. Ir. Ernie Tauruslian Amarullah, M.P

NIP. 196905031990032004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 502.521.178,00 atau mencapai 607,95% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 82.658.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp 19.720.549.781,00 atau mencapai 87,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp 22.542.446.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 176.634.630.597,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 44.074.390,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 176.547.322.737,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 43.233.470,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 176.634.630.597,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 419.378.463,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 17.999.626.269,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -17.580.247.806,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp 296.552,00 dan Defisit Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -17.579.951.254,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp 174.964.712.197,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-17.579.951.254,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 31.841.051,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 19.218.028.603,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 176.634.630.597,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	82.658.000,00	502.521.178,00	607,95	366.977.416,00
Jumlah Pendapatan		82.658.000,00	502.521.178,00	607,95	366.977.416,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.515.642.000,00	5.533.871.602,00	84,93	5.452.348.000,00
Belanja Barang	B.4.	10.268.704.000,00	10.027.933.010,00	97,66	8.607.817.781,00
Belanja Modal	B.5.	5.758.100.000,00	4.158.745.169,00	72,22	1.341.290.795,00
Jumlah Belanja		22.542.446.000,00	19.720.549.781,00	87,48	15.401.456.576,00

II. NERACA

BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	44.074.390,00	69.392.920,00
Jumlah Aset Lancar		44.074.390,00	69.392.920,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	150.071.864.736,00	146.844.994.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	25.916.069.183,00	26.160.532.533,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	14.010.474.283,00	13.229.993.500,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	793.298.500,00	793.298.500,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	27.425.550,00	27.425.550,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-14.271.809.515,00	-12.164.509.832,00
Jumlah Aset Tetap		176.547.322.737,00	174.891.734.251,00
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1.	43.450.724,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2.	-217.254,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		43.233.470,00	0,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	426.821.000,00	498.594.991,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-426.821.000,00	-493.016.745,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	5.578.246,00
Jumlah Aset		176.634.630.597,00	174.966.705.417,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	0,00	1.993.220,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	1.993.220,00
Jumlah Kewajiban		0,00	1.993.220,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	176.634.630.597,00	174.964.712.197,00
Jumlah Ekuitas		176.634.630.597,00	174.964.712.197,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		176.634.630.597,00	174.966.705.417,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	419.378.463,00	366.977.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		419.378.463,00	366.977.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.531.878.382,00	5.454.341.220,00
Beban Persediaan	D.3.	824.926.840,00	731.185.490,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.348.471.940,00	2.924.803.514,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.287.332.006,00	522.099.506,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	4.474.401.113,00	4.502.342.054,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	2.532.398.734,00	2.531.015.917,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	217.254,00	0,00
JUMLAH BEBAN		17.999.626.269,00	16.665.787.701,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-17.580.247.806,00	-16.298.810.701,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	55.200.099,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	5.578.246,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	111.688.131,00	45.220.466,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	161.013.432,00	46.396.547,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		296.552,00	-1.176.081,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-17.579.951.254,00	-16.299.986.782,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	174.964.712.197,00	46.937.580.330,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-17.579.951.254,00	-16.299.986.782,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	31.841.051,00	126.552.084.089,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	-1,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	33.610.000,00	125.641.699.808,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	-1.768.948,00	910.384.281,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	19.218.028.603,00	17.775.034.560,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	176.634.630.597,00	174.964.712.197,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Subsektor tanaman pangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan pertanian regional dan nasional. Kontribusi subsektor tanaman pangan tidak hanya terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB nasional, kesempatan kerja, sumber pendapatan serta pangan tidak hanya terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi perekonomian regional dan nasional. Selama krisis ekonomi subsektor ini telah memperlihatkan ketangguhannya dengan tetap tumbuh positif, sementara sektor lainnya mengalami pertumbuhan negative. Subsektor ini menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar.

Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta dampak perubahan iklim merupakan risiko yang selalu timbul dan harus diperhitungkan dalam setiap usaha tani. Antisipasi yang tidak memadai terhadap OPT dan perubahan iklim akan mengakibatkan eksplosif OPT, kekeringan dan banjir sangat merugikan dan menjadi kendala program pembangunan pertanian. Dalam sistem usaha agribisnis dan ketahanan pangan, perlindungan tanaman merupakan bagian yang penting baik dalam kegiatan budi daya (on farm) maupun di luar kegiatan budi daya (of farm). Oleh sebab itu perlindungan tanaman menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam kegiatan usaha tani.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman dan PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, kegiatan perlindungan tanaman dilaksanakan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). PHT harus menjwai setiap usaha budi daya tanaman dan pengamanan hasil tanaman, bahkan dalam era perdagangan bebas ini penerapan Sistem PHT menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produk dan jaminan proses produksi yang ramah lingkungan. Peramalan OPT adalah kegiatan yang diarahkan untuk mendeteksi/memprediksi populasi/serangan OPT, kemungkinan penyebaran dan akibat yang ditimbulkan dalam ruang dan waktu tertentu. Peramalan pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan OPT terutama dalam pengambilan keputusan pengendalian yang sesuai dengan prinsip dan penerapan PHT.

Sebagai arah kebijakan dalam pencapaian sasaran, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Jatisari dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;

- b. Pelaksanaan pelayanan kegiatan peramalan, Pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, serta faktor penentu perkembangan OPT;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem PHT;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit;
- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;
- i. Pelaksanaan pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Pengelolaan cadangan bahan pengendali OPT tingkat Nasional;
- k. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BBPOPT

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BBPOPT mempunyai Visi, yaitu “Menjadi Lembaga Terpercaya dan Pusat Pengembangan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Diakui Dunia Internasional”. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian visi, BBPOPT didukung atau memiliki imisi-misi sebagai berikut :

- Mengembangkan BBPOPT yang Profesional, Efektif dan Efisien;
- Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas di Bidang Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT;
- Menciptakan Model Peramalan OPT yang Tepat dan Akurat;
- Menciptakan Metode Pengamatan OPT yang Tepat dan Akurat;
- Merakit dan Mengembangkan Teknologi Pengendalian Tepat Guna yang Efektif, Efisien dan Aman;
- Menerapkan dan Mengembangkan Teknologi PHT Spesifik Lokasi;
- Meningkatkan Pelayanan dan Diseminasi Informasi Pengamatan, Peramalan dan Teknologi Pengendalian OPT.

Untuk pelaksanaan operasional dalam mencapai visi dan misi, BBPOPT memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik petugas, petani maupun masyarakat lainnya di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (perlindungan tanaman) dalam rangka pemahaman, pelaksanaan, pemasyarakatan dan pelembagaan konsepsi PHT;
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perlindungan tanaman;

- Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sinkronisasi dengan program dan kegiatan perlindungan tanaman antar berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Memberikan dukungan teknologi di bidang pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (P3OPT) kepada pihak pengambil kebijakan dalam pelaksanaan P3OPT dan rujukan proteksi;
- Berperan aktif dan pertumbuhan produksi pangan nasional khususnya padi, jagung, kedelai dan ubi kayu pada tahun 2015 - 2019

b. Sasaran

- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik petugas, petani maupun masyarakat lainnya di bidang pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (perlindungan tanaman) dalam rangka pemahaman, pelaksanaan, pemyarakatan dan pelembagaan konsepsi PHT;
- Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi instansi pemerintah, swasta dan masyarakat terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perlindungan tanaman;
- Terlaksananya penyusunan program dan evaluasi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sinkronisasi dengan program dan kegiatan perlindungan tanaman antar berbagai instansi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Terwujudnya dukungan teknologi di bidang pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (P3OPT) kepada pihak pengambil kebijakan dalam pelaksanaan P3OPT dan rujukan proteksi;
- Terwujudnya peran aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan tanaman pangan khususnya pencapaian dan pertumbuhan produksi pangan nasional khususnya padi, jagung, kedelai dan ubi kayu pada tahun 2015 - 2019

Dalam kebijakan Kementerian Pertanian, Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di BBPOPT ditunjuk sebagai penanggung jawab dan membina Kabupaten Rembang, Blora dan Grobogan (Kepala Balai), Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser Provinsi Aceh (Kabid Program dan Evaluasi), Kabupaten Kupang, Manggarai dan Manggarai Barat (Kabag Umum), Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara (Kabid Pelayanan Teknis dan Informasi) dalam rangka kegiatan Upsus Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) guna meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan.

Selain itu, beberapa petugas telah ditunjuk sebagai pendamping di tingkat lapangan khususnya Prov. Papua (Kasie Program), Prov. Kalimantan Timur (Kasie Pemantauan dan Evaluasi), di Prov. Gorontalo (Kasie Informasi dan Dokumentasi) , hal ini sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 222/KPTS/OT.050/M/3/2019 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya, yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan supervisi/monitoring dan pendampingan satuan kerja perangkat daerah pelaksanaan program.
- b. Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	22.158.000,00	22.158.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	60.500.000,00	60.500.000,00
Jumlah Pendapatan	82.658.000,00	82.658.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.415.642.000,00	6.415.642.000,00
Belanja Lembur	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.432.487.000,00	1.475.980.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.200.714.000,00	1.060.299.000,00
Belanja Barang Persediaan	1.026.617.000,00	923.945.000,00
Belanja Jasa	748.500.000,00	904.846.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.497.908.000,00	1.419.299.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.866.578.000,00	4.484.335.000,00
Belanja Modal Tanah	5.634.400.000,00	4.823.700.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.600.000,00	186.653.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	747.747.000,00
Jumlah Belanja	22.042.446.000,00	22.542.446.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 502.521.178,00 atau mencapai 607,95% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 82.658.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	25.477.000,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	22.158.000,00	459.701.101,00	2.074,65
Pendapatan Denda	0,00	14.610.461,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	2.732.616,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	60.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	82.658.000,00	502.521.178,00	607,95

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 36,94% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	25.477.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	459.701.101,00	366.977.000,00	25,27
Pendapatan Denda	14.610.461,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	2.732.616,00	416,00	656.778,85
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	502.521.178,00	366.977.416,00	36,94

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp19.720.549.781,00 atau 87,48% dari anggaran belanja sebesar Rp22.542.446.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	6.515.642.000,00	5.533.878.158,00	84,93
Belanja Barang	10.268.704.000,00	10.069.630.145,00	98,06
Belanja Modal	5.758.100.000,00	4.158.745.169,00	72,22
Total Belanja Kotor	22.542.446.000,00	19.762.253.472,00	87,67
Pengembalian Belanja		-41.703.691,00	0,00
Total Belanja	22.542.446.000,00	19.720.549.781,00	87,48

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 28,04% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu belanja tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan pagu 2018, selain belanja barang dan belanja modal, diupayakan maksimal untuk mencapai target dan kebutuhann sehingga realisasi mengalami dibanding tahun anggaran 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	5.533.871.602,00	5.452.348.000,00	1,50
Belanja Barang	10.027.933.010,00	8.607.817.781,00	16,50
Belanja Modal	4.158.745.169,00	1.341.290.795,00	210,06
Total Belanja	19.720.549.781,00	15.401.456.576,00	28,04

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 5.533.871.602,00 dan Rp 5.452.348.000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,50% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan pegawai sebanyak 2 orang pegawai fungsional, sehingga realisasi belanja pegawai ada kenaikan.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.509.751.158,00	5.461.136.004,00	0,89
Belanja Lembur	24.127.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.533.878.158,00	5.461.136.004,00	1,33
Pengembalian Belanja Pegawai	-6.556,00	-8.788.004,00	-99,93
Jumlah Belanja	5.533.871.602,00	5.452.348.000,00	1,50

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 10.027.933.010,00 dan Rp 8.607.817.781,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,50% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan pagu pada belanja pemeliharaan yang cukup signifikan serta maksimalnya penyerapan anggaran pada belanja pemeliharaan sehingga realisasi belanja barang pada TA. 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan ta. 2018.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.471.917.642,00	1.147.042.101,00	28,32
Belanja Barang Non Operasional	1.057.882.410,00	1.135.973.190,00	-6,87
Belanja Barang Persediaan	906.345.003,00	771.598.960,00	17,46
Belanja Jasa	846.020.023,00	641.788.223,00	31,82
Belanja Pemeliharaan	1.313.063.954,00	409.073.253,00	220,99
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.474.401.113,00	4.502.342.054,00	-0,62
Jumlah Belanja Kotor	10.069.630.145,00	8.607.817.781,00	16,98
Pengembalian Belanja Barang	-41.697.135,00	0,00	0,00

Jumlah Belanja	10.027.933.010,00	8.607.817.781,00	16,50
-----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 4.158.745.169,00 dan Rp 1.341.290.795,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 210,06% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan pagu belanja modal yang diperuntukkan untuk pembelian tanah sawah milik petani yang ada di sekitar kebun percobaan milik BBPOPT menyebabkan adanya peningkatan realisasi belanja modal TA. 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan TA. 2018.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	3.226.870.736,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.003.650,00	409.779.695,00	-54,85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	746.870.783,00	660.965.500,00	13,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	268.056.500,00	-100,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	2.489.100,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	4.158.745.169,00	1.341.290.795,00	210,06
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.158.745.169,00	1.341.290.795,00	210,06

B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3.226.870.736,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada tahun anggaran 2019, BBPOPT menambah luas lahan sawah untuk keperluan pengembangan teknologi peramalan, sehingga pada TA. 2019 ada penambahan pagu untuk belanja modal tanah, dengan demikian realisasi anggaran belanja modal tanah pada TA. 2019 lebih dan TA. 2018 tidak terdapat anggaran pembelian tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	3.226.870.736,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	3.226.870.736,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.226.870.736,00	0,00	0,00

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 185.003.650,00 dan Rp 409.779.695,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -54,85% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Turunnya belanja modal peralatan dan mesin dikarenakan adanya penghentian penggunaan kendaraan roda 2 dan empat dikarenakan sedang dalam proses lelang, sehingga belanja pemeliharaan kendaraan bermotor, baik roda 2 dan roda 4 berkurang, sehingga mempengaruhi realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.003.650,00	409.779.695,00	-54,85
Jumlah Belanja Kotor	185.003.650,00	409.779.695,00	-54,85
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	185.003.650,00	409.779.695,00	-54,85

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp746.870.783,00 dan Rp660.965.500,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,00% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

- Selain belanja modal tanah dan mesin, pada TA 2019, juga terjadi penambahan belanja modal gedung dan bangunan, penambahan gedung dan bangunan terjadi pada pembangunan pagar pembatas antara lahan BBPOPT dengan lahan penduduk di sekitar BBPOPT.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	746.870.783,00	660.965.500,00	13,00
Jumlah Belanja Kotor	746.870.783,00	660.965.500,00	13,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	746.870.783,00	660.965.500,00	13,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 44.074.390,00 dan Rp 69.392.920,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	43.574.390,00	68.785.470,00
Bahan untuk Pemeliharaan	20.000,00	28.000,00
Suku Cadang	480.000,00	480.000,00
Bahan Baku	0,00	99.450,00
Jumlah	44.074.390,00	69.392.920,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 150.071.864.736,00 dan Rp 146.844.994.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	146.844.994.000,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.226.870.736,00
Saldo per 31 Desember 2019	150.071.864.736,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

1. Adanya mutasi penambahan aset tanah yaitu berupa pembelian lahan sawah milik petani yang berada di dalam kebun percobaan BBPOPT yang masih dimiliki oleh petani.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 25.916.069.183,00 dan Rp 26.160.532.533,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	26.160.532.533,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	182.404.650,00
Reklasifikasi Masuk	7.415.100,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-426.821.000,00
Penghapusan	-47.000,00
Reklasifikasi Keluar	-7.415.100,00
Saldo per 31 Desember 2019	25.916.069.183,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-12.855.766.010,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	13.060.303.173,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Terjadi mutasi pengurangan aset peralatan dan mesin dikarenakan adanya lelang kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 pada tahun 2019 di BBPOPT.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.010.474.283,00 dan Rp13.229.993.500,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	13.229.993.500,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	680.958.000,00
Pengembangan Nilai Aset	65.912.783,00
Koreksi Kesalahan input IP	33.610.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	14.010.474.283,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-1.337.638.889,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	12.672.835.394,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan aset gedung dan bangunan terjadi dikarenakan adanya penambahan gedung bangunan yaitu pembangunan tembok pembatas antara lahan BBPOPT dengan penduduk/lahan orang lain yang dilaksanakan pada tahun 2019.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp793.298.500,00 dan Rp793.298.500,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp27.425.550,00 dan Rp27.425.550,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-14.271.809.515,00 dan Rp-12.164.509.832,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	25.916.069.183,00	-12.855.766.010,00	13.060.303.173,00
2.	Gedung dan Bangunan	14.010.474.283,00	-1.337.638.889,00	12.672.835.394,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	793.298.500,00	-59.670.000,00	733.628.500,00
4.	Aset Tetap Lainnya	27.425.550,00	0,00	27.425.550,00
Akumulasi Penyusutan		40.747.267.516,00	-14.271.809.515,00	26.475.458.001,00

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 43.450.724,00 dan Rp 0,00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Nama	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	CV. Panca Teknik Mandiri	38.476.000	0,00
2.	CV. Karya Tiga Putra	1.381.724	0,00
3.	CV. Dimensi Fazar	3.593.000	0,00
Jumlah		43.450.724	0,00

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp -217.254,00 dan Rp 0,00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	43.450.724,00	0,5%	2,172.536
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 426.821.000,00 dan Rp 498.594.991,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	498.594.991,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	426.821.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-498.594.991,00
Saldo per 31 Desember 2019	426.821.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-426.821.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Adanya penghapusan BMN yaitu berupa kendaraan roda 2 dan 4 melalui lelang di KPKNL Purwakarta.

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-426.821.000,00 dan Rp-493.016.745,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	426.821.000,00	-426.821.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		426.821.000,00	-426.821.000,00	0,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.993.220,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	1.993.220,00
Jumlah	0,00	1.993.220,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp176.634.630.597,00 dan Rp174.964.712.197,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp419.378.463,00 dan Rp366.977.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	14.610.461,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	10.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	383.580.000,00	349.611.000,00	9,72
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.921.002,00	17.366.000,00	-37,11
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	267.000,00	0,00	0,00
Jumlah	419.378.463,00	366.977.000,00	14,28

1. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah didapat dari pekerjaan kontraktual pengecatan gedung dan perbaikan toilet yang tidak terselesaikan tepat waktu.
2. Pendapatan penjualan dokumen dokumen pelelangan didapat dari hasil lelang BMN yang dilaksanakan oleh KPKNL Purwakarta.
3. Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budi daya hasil samping pertanian non litbang, gabah konsumsi pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun 2018. Hal ini dikarenakan tanam padi di tahun 2018 sedikit mendapatkan gangguan OPT dibandingkan dengan tahun 2019.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 5.531.878.382,00 dan Rp 5.454.341.220,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.915.468.600,00	3.838.303.680,00	2,01
Beban Pembulatan Gaji PNS	57.300,00	64.279,00	-10,86
Beban Tunj. Anak PNS	91.741.614,00	86.664.821,00	5,86
Beban Tunj. Beras PNS	214.797.720,00	220.591.320,00	-2,63
Beban Tunj. Fungsional PNS	249.210.000,00	268.950.000,00	-7,34
Beban Tunj. PPh PNS	8.842.726,00	8.241.072,00	7,30
Beban Tunj. Struktural PNS	98.535.000,00	119.865.000,00	-17,80
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	328.709.422,00	319.317.048,00	2,94
Beban Tunjangan Umum PNS	91.605.000,00	90.490.000,00	1,23
Beban Uang Lembur	24.127.000,00	0,00	0,00
Beban Uang Makan PNS	508.784.000,00	501.854.000,00	1,38
Jumlah	5.531.878.382,00	5.454.341.220,00	1,42

1. Secara umum beban gaji dan tunjangan untuk pegawai PNS pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding pada tahun 2018, hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai sebanyak 2 orang dengan jabatan fungsional POPT, namun demikian dikarenakan adanya pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar sebanyak 2 orang dari fungsional POPT dan fungsional umum, maka realisasi beban tunjangan fungsional pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018.
2. beban uang lembur pada tahun 2019 sebesar Rp. 24.127.000 dibandingkan dengan tahun 2018 senilai Rp. 0.00, dikarenakan pada tahun 2019, volume pekerjaan akhir tahun lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018, sehingga memerlukan waktu tambahan/over time untuk penyelesaian pekerjaan.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 824.926.840,00 dan Rp 731.185.490,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	51.726.151,00	139.454.500,00	-62,91
Beban Persediaan konsumsi	721.800.689,00	475.252.490,00	51,88
Beban persediaan lainnya	51.400.000,00	116.478.500,00	-55,87
Jumlah	824.926.840,00	731.185.490,00	12,82

1. Beban persediaan konsumsi pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini dikarenakan adanya kegiatan lapangan khususnya pada kegiatan pengamanan produksi, dimana pada setiap kegiatan dilakukan pertemuan dengan petani di sekitar lokasi, sehingga diperlukan biaya konsumsi untuk pembelian makan dan snack pertemuan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3.348.471.940,00 dan Rp 2.924.803.514,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	695.077.410,00	879.604.290,00	-20,98
Beban Barang Non Operasional Lainnya	95.115.000,00	64.308.900,00	47,90
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	50.000.000,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	155.640.000,00	142.080.000,00	9,54
Beban Honor Output Kegiatan	267.690.000,00	192.060.000,00	39,38
Beban Jasa Konsultan	89.454.750,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	240.800.000,00	161.850.000,00	48,78
Beban Keperluan Perkantoran	1.283.006.007,00	946.440.101,00	35,56
Beban Langganan Listrik	460.339.884,00	409.638.237,00	12,38
Beban Langganan Telepon	10.775.389,00	13.099.986,00	-17,75
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.923.500,00	8.522.000,00	-30,49

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Sewa	44.650.000,00	57.200.000,00	-21,94
Jumlah	3.348.471.940,00	2.924.803.514,00	14,49

1. Jumlah beban barang dan jasa secara umum pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, hal ini disebabkan karena adanya penambahan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk konsultan, selain itu adanya penambahan anggaran.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.287.332.006,00 dan Rp522.099.506,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	545.828.812,00	21.850.000,00	2.398,07
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	59.750,00	3.785.750,00	-98,42
Beban Persediaan suku cadang	741.443.444,00	496.463.756,00	49,34
Jumlah	1.287.332.006,00	522.099.506,00	146,57

1. Naiknya realisasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun 2019 dikarenakan adanya kegiatan pemeliharaan berupa pengecatan gedung kantor dan perbaikan toilet serta pintu kantor juga pembangunan pagar pembatas kantor dengan lahan orang lain.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 4.474.401.113,00 dan Rp 4.502.342.054,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3.965.694.153,00	4.035.878.574,00	-1,74
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.500.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	99.685.000,00	105.000.000,00	-5,06
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	377.521.960,00	361.463.480,00	4,44
Jumlah	4.474.401.113,00	4.502.342.054,00	-0,62

1. Turunnya realisasi beban perjalanan dinas di tahun 2019, dikarenakan tidak maksimalnya penyerapan anggaran perjalanan dinas pada kegiatan kajian lapangan, dimana sampai dengan akhir tahun 2019, kegiatan lapangan masih menyisakan anggaran perjalanan dinas yang cukup besar.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.532.398.734,00 dan Rp 2.531.015.917,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	671.237.982,00	658.021.429,00	2,01
Beban Penyusutan Irigasi	10.361.876,00	8.372.740,00	23,76
Beban Penyusutan Jaringan	7.458.750,00	7.458.750,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	2.025.811,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.843.340.126,00	1.855.137.187,00	-0,64
Jumlah	2.532.398.734,00	2.531.015.917,00	0,05

1. Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018, khususnya ada beban penyusutan gedung dan bangunan serta beban penyusutan irigasi, hal ini dikarenakan adanya penambahan nilai gedung dan bangunan yaitu dengan adanya penambahan jaringan irigasi pada tahun 2018 yang penyusutannya berada di tahun 2019, serta pemeliharaan gedung yang dilakukan pada tahun 2019.

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 217.254,00 dan Rp 0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	217.254,00	0,00	0,00
Jumlah	217.254,00	0,00	0,00

1. Beban penyisihan piutang tak tertagih dikarenakan adanya sisa piutang TGR pada tahun 2019 yaitu TGR dari pihak ketiga yang belum melunasi piutang TGR sebesar Rp. 43.450.724 dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp. 217.254 sehingga piutang yang dikategorikan tidak akan tertagih sebesar Rp. 43.233.470

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-5.578.246,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-161.013.432,00	-46.396.547,00	247,04
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	23.467.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	45.460.724,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	40.294.791,00	45.220.050,00	-10,89
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	55.200.099,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.465.616,00	416,00	592.596,15
Jumlah	296.552,00	-1.176.081,00	-125,22

1. Pos surplus pada tahun 2019 dikarenakan adanya pengembalian belanja anggaran tahun lalu sebesar Rp. 2.465.616 yaitu dari pengembalian belanja pembayaran jabatan fungsional dan jabatan struktural a.n. Rahmad Gunawan, S.P dan Yoshi Futaki, S.IP serta adanya penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain serta pihak ketiga.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp174.964.712.197,00 dan Rp46.937.580.330,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-17.579.951.254,00 dan Rp-16.299.986.782,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp31.841.051,00 dan Rp126.552.084.089,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-1,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp33.610.000,00 dan Rp125.641.699.808,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Gedung dan Bangunan	33.610.000,00
Jumlah	33.610.000,00

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-1.768.948,00 dan Rp910.384.281,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.768.948,00
Jumlah	-1.768.948,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.218.028.603,00 dan Rp17.775.034.560,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.720.549.781,00
Diterima dari Entitas Lain	-502.521.178,00
Jumlah	19.218.028.603,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-502.521.178,00 sedangkan DKEL sebesar Rp19.720.549.781,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp176.634.630.597,00 dan Rp174.964.712.197,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Adanya penambahan belanja modal berupa pembelian tanah sawah milik petani yang berada didalam kebun percobaan BBPOPT, sehingga luas tanah sawah BBPOPT menjadi bertambah.
2. Adanya lelang kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 berupa satu unit mobil Merek Nissan X-Trail dan sepeda motor sebanyak 10 unit. Sebanyak 4 unit sepeda motor sudah terlelang dan sisanya 6 unit masih dalam tahap lelang ulang, dan diusulkan kembali pada tahun 2020.
3. Adanya penyelesaian ganti kerugian negara terhadap PNS bukan bendahara dan terhadap pihak ketiga.
4. Adanya penambahan nilai penyusutan berupa pemeliharaan gedung dan bangunan yaitu pengecatan gedung serta perbaikan pintu kantor dan toilet serta pembangunan pagar pembatas kantor.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Adanya penambahan pagu anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Hortikultura untuk kegiatan pengelolaan laboratorium dan keperluan kantor.
2. Terjadi revisi DIPA BBPOPT sebanyak 4 kali yaitu :
 - a. Revisi pertama pada bulan April 2019
 - b. Revisi ke dua pada bulan Juli 2019
 - c. Revisi ke tiga pada bulan Agustus 2019
 - d. Revisi ke empat pada bulan Oktober 2019

LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. LAPORAN SAIBA
2. BUKTI SETOR SSBP/PNBP
3. BUKTI SURAT PEMBUKAAN REKENING BENDAHARA
4. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA (LPJB)
5. REKENING KORAN BULAN DESEMBER 2019
6. DIPA
7. BAR REKON KPPN0
8. HASIL TELAAH
9. HASIL REVIU

LAMPIRAN 1
LAPORAN SAIBA

LAMPIRAN 2
BUKTI SETOR SSBP/PNBP

LAMPIRAN 3
BUKTI SURAT PEMBUKAAN
REKENING BENDAHARA

LAMPIRAN 4
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA (LPJB)

**LAMPIRAN 5
REKENING KORAN BULAN
DESEMBER 2019**

LAMPIRAN 6
DIPA

**LAMPIRAN 7
BAR REKON KPPN**

**LAMPIRAN 8
HASIL TELAAH**

LAMPIRAN 9
HASIL REVIU